

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor :
1624/Pdt.G/2009/PA.SDA)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

FRISKO DWI KARISMA YUDHA

NPM. 0871010034

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor :
1624/Pdt.G/2009/PA.SDA)

Disusun Oleh :

FRISKO DWI KARISMA YUDHA
NPM. 08710100034

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

H. Sutrisno, SH, M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

P. Handoko, SH, S.Sos, MM
NIP. 19660926199203 1 001

DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor :
1624/Pdt.G/2009/PA.SDA)

Oleh :

FRISKO DWI KARISMA YUDHA
NPM. 08710100034

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada Tanggal 7 juni 2012

Pembimbing Utama

TIM PENGUJI ;

1

H. Sutrisno, SH, M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

H. Sutrisno SH, M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

2

Pembimbing Pendamping

Subani, SH, M.Si
NIP. 19510504 198303 1 001

P. Handoko, SH, S.Sos, MM
NIP. 19660926199203 1 001

3

Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui

DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP. 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Frisko Dwi Karisma Yudha
Tempat/Tgl Lahir : 25 Mei 1990
NPM : 0871010034
Kosentrasi : Perdata
Alamat : Sidodadi RT 12 RW 02 Kec. Taman Kab. Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : “PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1624/Pdt.G/2009/PA.SDA)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
Pembimbing Utama

Surabaya, 28 Mei 2012
Penulis

H. Sutrisno, SH, M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

Frisko Dwi Karisma Yudha
NPM. 0871010034

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI. Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1624/Pdt.G/2009/PA.SDA”.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dalam kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Drs. Mame Sadafal, MH selaku Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Bapak Sutrisno, SH., M.Hum, selaku pembimbing utama dalam skripsi ini dan Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim yang setia dalam membimbing dan mengarahkan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Drs. EC. Gendut Sukarno, MS, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Bapak Subani, SH., M.Si., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Drs. A. Faqih, SH, selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Panggung Handoko, S.Sos, SH, MM, selaku Dosen pembimbing pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penyusun sampai selesainya skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Wagiran dan Ibu Peny yang menjadi penyemangat terbesarku, yang selalu memberi doa, dukungan dan selalu menguatkan dalam setiap langkah kehidupan.
10. Kakakku Yossita Eka Anjasari, S.Pd, M.Pd yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doanya selama ini.
11. Sahabat-sahabatku tercinta, Ulul, Dito, Vinna, Yudis, Icha, Flow, serta seluruh Mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa suatu nilai kesempurnaan hanya milik Allah SWT, maka dengan penuh keikhlasan penulis akan merasa sangat berbahagia apabila terdapat kritik maupun saran yang bersifat membangun demi

kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi momentum awal yang bermanfaat bagi perkembangan disiplin ilmu, terutama dalam bidang Ilmu Hukum serta tegaknya hukum di Indonesia.

Surabaya, Juni 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMANJUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACTION	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kajian Pustaka	8
1.5.1 Perkawinan	8
1.5.2 Rukun dan Syarat Perkawinan	11
1.5.3 Larangan-larangan Perkawinan	16
1.5.4 Pembatalan Perkawinan	17

1.5.4.1 Pembatalan Perkawinan Menurut UU. No. 1	
Th. 1974 dan KUH perdata	17
1.5.4.2 Pembatalan Perkawinan Menurut	
Kompilasi Hukum Islam.....	21
1.5.5 Pemalsuan Identitas	22
1.5.6 Izin Beristri lebih Dari satu Orang	24
1.5.6.1 Syarat-syarat dan Alasan	
Beristri Lebih Dari Satu Orang	24
1.5.6.2 Tata Cara Pengajuan permohonan, dan Acara	
Pemeriksaan Beristri Lebih Dari Satu Orang...	26
1.5 Metode Penelitian	28
1.6.1 Jenis Penelitian	28
1.6.2 Sumber Data	29
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	31
1.6.4 Metode Analisis Data	32
1.6.5 Sistematika Penulisan	32
BAB II. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMALSUAN IDENTITAS	
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	
.....	35
2.1 Prosedur Pengajuan Perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan	
di Pengadilan Agama Sidoarjo.....	35
2.2 Tata Cara Gugatan Pembatalan Perkawinan Melalui Pengadilan	
Agama Sidoarjo.....	38
2.2.1 Pengajuan Gugatan.....	38
2.2.2 Penerimaan Perkara.....	39

2.2.3 Tahap Persiapan.....	39
2.2.4 Pemanggilan.....	40
2.2.5 Persidangan.....	40
2.2.6 Putusan.....	42
2.3 Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Identitas Perkawinan	
Di Pengadilan Agama Sidoarjo.....	43
BAB III. PERTIMBANGAN HUKUM DAN AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO.....	46
3.1 Pertimbangan Hukum Yang Dipakai Dalam Putusan Perkara	
Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor :1624/Pdt.G/2009/Pa.Sda).....	46
3.1.2 Analisis Pertimbangan Hukum Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan putusan nomer 1624/Pdt. G/2009/Pa.Sda.....	47
3.2 Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan	52
3.2.1 Terhadap Suami Istri	53
3.2.2 Terhadap Anak-anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Tersebut.....	54
3.2.3 Terhadap harta bersama.....	55
3.2.4 Terhadap Pihak Ketiga.....	56
BAB IV. PENUTUP.....	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Prosedur Pengajuan Gugatan Pembatalan

Perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo..... 36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian Skripsi
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara Dengan Pihak Pengadilan Agama
- Lampiran 3 : Jurnal Hukum
- Lampiran 4 : Putusan Hakim 1624/Pdt.G/2009/PA.Sda.
- Lampiran 5 : Bukti P.22 (foto copy surat keterangan untuk nikah (model N.1) nomor 468/474.2/58/x/2006),
- Lampiran 6 ; Bukti P.1 (foto copy akta nikah S bin A dengan BS binti AA nomor : 1033/55/II/1997 tanggal 24 Febuari 1997)
- Lampiran 7 : Bukti P.14 (foto copy KTP atas nama S bin A No :10.1203.040444 dari Kecamatan Tambun Selatan Bekasi)

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Frisko Dwi Karisma Yudha
NPM : 0871010034
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 20 Mei 1990
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor :
1624/Pdt.G/2009/PA.SDA)

ABSTRAK

Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo, dan Pertimbangan hukum serta akibat hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Apabila dilihat dari sifat dan pendekatannya maka termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksudkan yaitu dengan jalan menentukan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahannya yang diteliti dan data-data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Setelah data teridentifikasi kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk pertimbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, memberikan gambaran pada instansi yang bergerak di bidang perkawinan, memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat dipergunakan sebagai bahan masukan terhadap para pihak yang mengalami dan terlibat langsung dengan judul ini. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas perkawinan tidak semena-mena menjadi kesalahan yang dibuat oleh si pelaku. Hal ini bisa diketahui dari adanya peluang yang diberikan oleh pembuat identitas dengan minimnya filterisasi serta penyalahgunaan jabatan. Kurangnya filterisasi ini menunjukkan bahwa pengawasan dari pemerintah masih kurang. Sehingga masyarakat dengan mudah mendapat identitas sesuai dengan apa yang diinginkan pelaku tanpa melihat kondisi asli dari si pelaku

Kata Kunci : Pembatalan, Perkawinan, Pemalsuan, Identitas.

ABSTRACTION

This Research reply the problems of concerning cause factor of the happening of forgery of marriage identity in Justice of Religion Sidoarjo, and Basis for law and also legal consequences of marriage cancellation of because identity forgery in polygamous marriage. This research represent the research type punish the normatif, that is law research by checking substance of book or date sekunder consisted of the substance punish the primary, substance punish the sekunder, and tertiary law substance. If seen from nature of and its approach hence the inclusive of descriptive research qualitative intended that is way of determining and depicting what the existence of as according to its problems is accurate and obtained data. Technique of data collecting used in this research is by bibliography study and interview. After date identified systematically is later; then analysed to use the technique analyse qualitative. Benefit obtained from this research is to science consideration of generally and science punish especially, giving picture of institution which is active in marriage, giving answer to accurate problems and also can be utilized upon which input to natural the parties and involved direct with this title. Result of research of showing of cause factor of the happening of forgery of marriage identity do not without considering becoming mistake which is made by the perpetrator. This matter can be known from existence of opportunity given by identity maker with its minim is screening and also position/occupation abuse. Lack of this filterisasi indicate tis that observation from government still less. So that society easily get the identity as according to what made cool by perpetrator without seeing original condition from the perpetrator.

Keyword : Cancellation, Marriage, Forgery, Identity.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan, hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan isteri. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya dalam QS Ar-Ruum 21: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.¹

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan negara dengan terperinci dan lengkap. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan.

¹ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, 2006, Jakarta. h. 51

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.²

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya dalam kehidupannya memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Pergaulan hidup rumah tangga di bina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami istri.

Dengan perkawinan akan didapat keturunan yang sehat jasmani, rohani dan mampu menjadi generasi penerus yang tangguh. Organisasi keluarga yang dibentuk dengan melalui perkawinan adalah merupakan inti dari organisasi bernegara. Kehidupan yang bahagia tentram dan damai akan dapat menciptakan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

² CST Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1986 h. 227

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan yang dilakukan orang islam adalah sah apabila mengikuti ajaran islam. Dengan demikian untuk sahnya suatu perkawinan harus dipenuhi segenap rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam.³

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka perkawinan benar-benar diakui sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai dengan perumusan pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini⁴.

Hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menganut kebolehan poligami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Poligami yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita. Islam membolehkan poligami, namun melarang poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki. Apabila seorang suami hendak poligami, maka

³ Afdol, Legislasi Hukum Islam Di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, Cet I, 2006, h. 83

⁴ CST Kansil, Op.cit h. 227

harus memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 41 a PP No.9 Tahun 1975. Alasan tersebut yaitu Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan poligami tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan.

Syarat-syarat tersebut yaitu adanya persetujuan istri/istri-istri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Mengenai syarat persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya untuk melakukan poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan, akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang di Pengadilan Agama . Sekarang ini, terkesan bahwa poligami adalah hal yang wajar dan biasa, padahal berdasarkan UU Perkawinan dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu pula sebaliknya. Pengecualian bagi suami untuk memiliki lebih dari satu istri hanya apabila diizinkan oleh Pengadilan. Izin tersebut dapat diberikan dengan alasan-alasan tertentu antara lain istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat memberikan keturunan.

Selain itu, juga harus ada jaminan bahwa suami akan bertindak adil dan mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya. Pada prinsipnya

UU Perkawinan bertujuan untuk mengatur sistem dan tata cara perkawinan yang sah tidak hanya menurut agama atau kepercayaan masing-masing tapi juga melegalkan di depan hukum. Di samping itu, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pembatalan perkawinan. UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat dibatalkan oleh Pengadilan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 UU Perkawinan. Mengenai hal tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975, bahwa Pengadilan dapat memutuskan pembatalan suatu perkawinan.

Hubungan perkawinan tidak hanya sebagai kontrak hidup antara seorang suami dengan seorang istri saja, akan tetapi dapat juga seorang suami memiliki istri lebih dari seorang. Pola hubungan seperti inilah yang disebut dengan poligami. Poligami banyak menjadi permasalahan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, sehingga keinginan suami untuk melakukan poligami sering tidak dapat diterima oleh istri. Melihat kenyataan bahwa pelaksanaan poligami terutama di Indonesia ini sulit, karena Undang-Undang menetapkan berbagai persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi begitu saja, maka ada kecenderungan di masyarakat untuk melakukan poligami dengan mengambil jalan pintas dengan cara-cara yang dilarang, sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu secara diam-diam, tanpa sepengetahuan istri, bahkan tanpa didaftarkan dicatatkan nikah, ada juga yang menggunakan identitas palsu.

Perkawinan tidak selalu kekal tetapi dapat putus apabila ada salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian dan adanya putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena adanya putusan Pengadilan terjadi bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam rumusan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU perkawinan, Pasal 22 yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” dan ditegaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi orang Islam untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁵ Untuk memperoleh putusan pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan seseorang harus beracara di muka pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya sesuatu kasus, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu direalisasi, kalau perlu dengan pelaksanaan (eksekusi) paksa. Dengan demikian, hak-hak dan

⁵ Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama, 2010 h. 147

kewajiban yang diberikan oleh hukum materiil yang diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan itu dapat jalan atau diwujudkan.⁶

Apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat perkawinan, maka orang tua, keluarga, PPN (Pegawai Pengadilan Negeri) dan jaksa dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas perkawinan di pengadilan Agama Sidoarjo ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dan akibat pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ada 2 yakni :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas perkawinan di pengadilan Agama Sidoarjo

⁶ Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, 2007, h. 8

⁷ Mahkamah Agung RI, Op. Cit, h. 146

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dan akibat pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah;

1.4.1 Manfaat teoritis

- a. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam pembatalan perkawinan
- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Perkawinan

a. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat, dibentuk menurut undang-undang, mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal, tidak tampak langsung, merupakan ikatan psikologis, tanpa paksaan, berdasarkan cinta kasih suami istri, ada kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.⁸ Bila definisi tersebut di atas kita telaah, maka terdapatlah lima unsur di dalamnya:

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara seorang pria dan wanita;
3. Sebagai suami istri;
4. Membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.⁹

b. Perkawinan Menurut KUH Perdata

Sedangkan dalam Pasal 26 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Hal tersebut berarti KUH Perdata hanya mengakui perkawinan perdata yaitu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh KUH Perdata, sehingga terlepas dari peraturan-peraturan yang diadakan oleh suatu agama tertentu.

⁸http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/perkawinan/umur_perkawinan.htm

⁹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, 1986, h. 38

c. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian antara mempelai lelaki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, dalam mana si wali menyatakan pemasrahannya (ijab) yang disusul oleh pernyataan penerimaan (qobul) dari bakal suami, pernyataan mana disaksikan oleh sedikit-dikitnya dua saksi.¹⁰

Nikah menurut konteks fiqh, tidak semata-mata tercermin dalam konotasi makna biologis dari pernikahan itu sendiri, akan tetapi juga sekaligus menyiratkan dengan jelas hubungan psikis kejiwaan ataupun kerohanian dan tingkah laku pasangan suami istri dibalik hubungan biologis itu. Dalam kata nikah, terdapat hubungan suami istri bahkan hubungan orangtua dengan anak, yang akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri. Dengan demikian, melalui perkawinan akan menimbulkan hubungan komunitas sosial yang dapat diwujudkan dalam konteks yang sangat luas.¹¹

d. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Hubungan sebagai suami istri dapat membawa akibat-akibat biologis artinya dari hubungan yang demikian itu dapat dilahirkan anak-anak. Karena itu dalam suasana hukum adat masalah perkara perkawinan bukanlah masalah dari pria dan wanita yang bersangkutan saja. Melainkan juga merupakan urusan dari orang tua yang bersangkutan dari keluarganya¹²

e. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

¹⁰ Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, 1985, h. 123

¹¹ Idha Aprilyana Sembiring, Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di Kalangan Pelaku Poligami Di Kota Medan, Jurnal Equality, 2007

¹² Djaren Saragih, Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, 1996, h. 123

kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kompilasi Hukum Islam merupakan pegangan bagi Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi orang yang beragama Islam.

1.5.2 Rukun dan Syarat Perkawinan

Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan undang-undang. Sedangkan syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan undang-undang, sebelum perkawinan dilangsungkan . Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, orang yang beragama Islam harus memenuhi rukun perkawinan. Rukun yang dimaksud tersebut yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi, ijab, kabul dan mahar/mas kawin. Berdasarkan ketentuan hukum Islam, ditambah dengan adanya kerelaan dari pihak calon istri .

Calon istri dan calon suami, masing-masing harus bebas dalam menyatakan pesetujuannya. Apabila calon istri dan calon suami sudah bersepakat, maka kesepakatan itu mengikat di antara keduanya. Wali berarti orang yang berhak mengawinkan. Orang yang dapat menjadi wali menurut susunannya ialah :

1. Bapak
2. Kakak
3. Saudara lelaki yang seibu - seapak
4. Saudara laki-laki seapak
5. Anak saudara laki-laki seibu-seapak
6. Anak saudara seapak

7. Saudara laki-laki dari bapak, yang seibu-sebapak
8. Saudara laki-laki dari bapak, yang sebapak
9. Anak laki-laki dari nomor. 7
10. Anak laki-laki dari nomor. 8.¹³

Apabila orang-orang tersebut tidak mampu menjadi wali atau menolak tanpa sebab serta alasan-alasan yang jelas, seorang penghulu dapat bertindak sebagai wali hakim. Wali nikah bagi calon istri harus dipenuhi. Jika tidak ada maka perkawinan dapat batal demi hukum.

Wali nikah ada 2 (dua) macam. Pertama, wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Sebagai contoh orang tua kandung, sepupu satu kali melalui garis ayahnya. Kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada, atau karena sebab lainnya¹⁴

Calon istri menerima calon suami berdasarkan keridhoan (suka). Dasarnya adalah hadits Bukhari, Seorang janda atau perempuan yang telah bercerai tidak boleh dikawinkan sampai diperoleh persetujuan daripadanya; seorang gadis juga tidak boleh dikawinkan sebelum ada persetujuan daripadanya.¹⁵

Mahar/maskawin, yaitu pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita dan menjadi milik mempelai wanita itu sendiri dan bukan walinya. Berdasarkan UU Perkawinan, syarat perkawinan adalah

¹³ Ibid, h. 125

¹⁴ Zainuddin ali, Op. Cit, h. 16

¹⁵ Soetojo Prawirohamidjojo, Op. Cit, h. 31

hal-hal yang harus dipenuhi jika akan melangsungkan perkawinan, yaitu:

1) Ada persetujuan dari kedua belah pihak

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Artinya kedua calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

2) Pria sudah berumur 19 tahun, wanita 16 tahun

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas umur ini ditetapkan maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan

3) Izin orang tua/pengadilan jika belum berumur 21 tahun

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, karena mereka belum dewasa menurut hukum. Jika salah satu orang tua meninggal, izin cukup dari orang tua yang masih hidup. Jika yang meninggal keduanya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke

atas. Jika ada perbedaan pendapat antara orang tersebut, Pengadilan dapat memberi izin, setelah mendengar orang tersebut lebih dahulu.

4) Tidak terdapat larangan kawin

Ketentuan tentang larangan melangsungkan perkawinan antara orang yang berhubungan persaudaraan terdapat dalam Pasal 8 huruf (a) hingga huruf (f) UU Perkawinan. Disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

5) Tidak terikat oleh suatu perkawinan lain.

Pasal 9 UU Perkawinan melarang seseorang yang masih terikat suatu perkawinan lain untuk kawin lagi. Pengecualian terhadap pasal ini ada dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 UU Perkawinan. Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan memuat ketentuan mengenai izin yang diberikan oleh Pengadilan kepada suami untuk poligami. Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan memuat ketentuan mengenai pengajuan permohonan poligami, sedangkan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan memuat ketentuan mengenai

kondisi istri yang menyebabkan suami boleh poligami. Sedangkan Pasal 5 UU Perkawinan memuat ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami untuk dapat mengajukan permohonan poligami.

- 6) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/istri yang akan dikawini.

Pasal 10 UU Perkawinan, mengatur mengenai suami istri yang telah bercerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi. Maksud Pasal 10 UU Perkawinan dalam Penjelasan UU Perkawinan, yaitu agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal, oleh karena itu suatu tindakan yang mengakibatkan terputusnya perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan dan difikirkan masak-masak

- 7) Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang iddah).

Pasal 11 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan. Penetapan tenggang iddah sangat penting karena berhubungan langsung dengan persoalan anak yang akan dilahirkan melepas perkawinan itu terputus. Melalui masa tunggu, dapat ditentukan anak dari siapakah sesungguhnya anak yang akan lahir itu

8) Memenuhi tatacara perkawinan.

Undang-undang Perkawinan menetapkan tentang pencatatan dan tatacara perkawinan pada Peraturan Pelaksanaannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan.

1.5.3 Larangan-larangan Perkawinan

- A. Larangan perkawinan menurut KUH Perdata terdapat pada Pasal 31-33 yaitu sebagai berikut:
 - 1) Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan.
 - 2) Larangan untuk kawin dengan orang, dengan siapa orang itu pernah melakukan perbuatan zina.
 - 3) Larangan untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat 1 tahun.
- B. Larangan perkawinan menurut UU Perkawinan terdapat pada Pasal 8 yaitu:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda.
 - 4) Berhubungan susuan.
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- C. Oleh agama sehubungan dengan perkawinan dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan dilarang untuk sementara waktu pada KHI Pasal 39 dan 40 yaitu :
 - 1) Larangan Perkawinan antara seorang pria atau wanita yaitu :
 - a) Karena Pertalian Nasab.
Masih ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas seperti ayah, nenek, ibu atau garis keturunan lurus ke bawah seperti anak, cucu, cicit atau juga garis keturunan menyamping seperti saudara orang tua atau saudara dari nenek/kakeknya.
 - b) Karena Pertalian Kerabat Semenda.

Misalnya perkawinan antara seorang pria dengan mertua, ibu tiri, anak tiri.

c) Karena Pertalian Susuan.

Dilarang seorang kawin dengan semua anak dari ibu susuan atau dengan ibu susuan.

2) Larangan Perkawinan karena hal tertentu:

- a) Perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
- b) Perempuan yang sedang menjalani masa iddah talak atau kematian.
- c) Perempuan yang sudah ditalak tiga kali, kecuali kalau bekas isterinya telah kawin dengan pria lain dan perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.
- d) Mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam waktu yang sama, kecuali jika isteri sudah bercerai, baik cerai mati atau cerai hidup.
- e) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

1.5.4 Pembatalan Perkawinan

1.5.4.1 Pembatalan Perkawinan Menurut UU Perkawinan Dan KUH Perdata

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Dalam UU Perkawinan ketentuan mengenai batalnya suatu perkawinan diatur pada Pasal 22 - Pasal 28. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan disalahgunakannya pembatalan perkawinan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi Instansi Pemerintah atau Lembaga lain di luar Pengadilan atau siapapun juga tidak berwenang untuk menyatakan batalnya suatu perkawinan. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri (Pasal 25 UU Perkawinan).

Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lainnya (Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan). Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama, Dalam sistem peradilan nasional di Indonesia.¹⁶ Pada Pasal 22 UU Perkawinan terdapat kata “dapat dibatalkan”, sehingga dalam Penjelasan UU Perkawinan dinyatakan bahwa pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan boleh batal atau tidak boleh batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak

¹⁶ Zainuddin Ali, Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakart, 2006, h.92

menentukan lain. Jadi tegasnya Pengadilan dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan ini harus selalu memperhatikan ketentuan agamanya dari mereka yang perkawinannya dimintakan pembatalannya. Bagaimanapun jika menurut ketentuan agama perkawinan itu sebagai sah, Pengadilan tidak dapat membatalkan perkawinan itu .

Perkawinan dapat dikatakan sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sehubungan dengan sahnya perkawinan, apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Hal ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada, bahkan tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat yang dimaksudkan tidak terbatas pada syarat menurut hukum agama, tetapi juga syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sementara tidak terpenuhinya syarat yang diatur oleh undang-undang tidaklah berarti perkawinannya tidak sah menurut hukum agama. Apabila ada penghalang perkawinan maka harus dicegah.

Bahkan jika perkawinan terlanjur telah dilaksanakan dapat diajukan pembatalannya. Jadi, apabila suami melakukan perkawinan lagi dengan pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan istri, atau istri melakukan perkawinan karena dipaksa atau dibawah ancaman, atau suami ternyata telah memalsukan identitasnya, atau perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan, maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan. Sebagai perbandingan, ketentuan dalam Pasal 85 KUH Perdata menyatakan bahwa kebatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh Hakim. Pembatalan perkawinan karena dilanggarnya beberapa ketentuan dalam KUH Perdata dapat diminta, baik oleh suami istri sendiri, maupun oleh orang tua mereka atau kaum keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun dari semua orang yang berkepentingan dengan itu, dan oleh Pegawai Penuntut Umum.

Dalam perkawinan rangkap (pasal 86 jo pasal 27 KUH Perdata) yang berhak menuntut kebatalan adalah :

- a. Suami atau istri dari perkawinan pertama
- b. Suami atau istri dari perkawinan kedua
- c. Sanak keluarga sedarah dalam garis lurus keatas
- d. Mereka yang berkepentingan
- e. Kejaksaaan¹⁷

¹⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, Op. Cit, h. 80

1.5.4.2 Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi hukum islam sebagai sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga membahas permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan pasal 70-76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan.

Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 74 ayat (1) dan (2). Adapun mengenai pihak mana yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.

Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum

islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67. Dalam praktek di Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam syari'at islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan. Begitupula para pihak yang berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau istri saja.

1.5.5 Pengertian Pemalsuan Identitas

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data – data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama – tama dalam kelompok kejahatan ” Penipuan ” ; hingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan

penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan – akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang / surat / data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan / data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar. Pengertian Identitas adalah tanda pengenal / tanda asal usul seseorang

Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya. Adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan – akan berasal dari orang lain daripada penulisnya (pelaku). Ini disebut pemalsuan meteriil ,Asal surat itu adalah palsu.

Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan – perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya. Tidak perduli, bahwa ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang benar; perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat.

1.5.6 Izin Beristri Lebih Dari Satu Orang

1.5.6.1 Syarat-Syarat Dan Alasan Beristri Lebih Dari Satu Orang

A. UU. No. 1/1974

Pasal 3 ayat (2)

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

UU. No. 1/1974, Pasal 4 ayat (2)

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

UU. No. 1/1974, Pasal 5

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

B. PP. No.9/1975

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi:
 - a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan;

2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;

3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau

b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau

c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;

d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

C. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 55 ayat (2), (3)

2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

3) Apabila syarat-syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57 menjelaskan, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 58, menjelaskan bahwa:

1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974:

a. Adanya persetujuan istri,

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya yang sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

1.5.6.2 Pengaturan Tentang Pengajuan Permohonan, dan Acara

Pemeriksaan Beristri Lebih Dari Satu Orang

Adapun ketentuan yang mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan dan acara pemeriksaan beristri lebih dari seorang diatur sebagai berikut:

a. UU. No.1/1974, Pasal 4 ayat (1)

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

b. PP. No.9/1975, Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

PP. No.9/1975, Pasal 41, pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi:
 - a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
- 3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau

- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;
- 4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

PP. No. 9/1975, Pasal 42

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan berserta lampiran-lampirannya.

PP. No. 9/1975, Pasal 43

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 56 ayat (1), (2)

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII PP No.9 tahun 1975.

A. Syarat Pengajuan Permohonan Poligami Bagi

PNS/TNI/POLRI

- a) Surat Permohonan
- b) Foto copy Surat Nikah dengan istri pertama yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos
- c) Foto Copy KTP Pemohon, istri pertama dan calon istri kedua masing-masing 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong)
- d) Surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon
- e) Surat keterangan tidak keberatan dimadu dari istri pertama dan calon istri kedua bermaterai Rp.6.000,
- f) Surat keterangan gaji/penghasilan dari perusahaan/kantor/Kelurahan diketahui oleh Camat setempat
- g) Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI)

- h) Surat keterangan status calon istri kedua dari Kelurahan¹⁸

1.6 Metode Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti ”jalan ke” namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
2. Suatu tehnik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.¹⁹

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya²⁰

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian berupa perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut,

¹⁸ Pengadilan Agama Sidoarjo, Standar Operasional Pelaksanaan 2011

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres, Jakarta, 1986, h.5

²⁰ Ibid, h. 53

atau penelitian berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.²¹

Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan peraturan perundang undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus Perkawinan, yang diatur sesuai dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang meliputi pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Sehingga bisa diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif .

1.6.2 Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.²² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data data sekunder, adapun maksudnya adalah sebagai berikut:

Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan ini terdiri dari, norma atau kaidah dasar yaitu Peraturan Perundang-undangan, meliputi:
 - Undang-Undang,
 - Peraturan Pemerintah,

86 ²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, 2008, Bandung, h.

²² Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h.52

- Peraturan Menteri dan sebagainya.

Berdasarkan teori diatas, maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama
 - d) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan.
 - e) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991
2. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya²³
- Dalam hal ini penulis akan menganalisa rumusan masalah yang diperoleh dari Putusan Hakim, literatu-literatur hukum, internet, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan pada akhirnya dikaitkan berdasarkan UU Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, indeks, ensiklopedia dan sebagainya.²⁴

²³ Ibid,

²⁴ Ibid,

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Adapun maksudnya adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Telaah pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji tersebut kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif.²⁵

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan obyek yang diteliti, dengan cara menelaah atau membaca buku literatur, peraturan perundang-undangan, maupun kumpulan atau hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis.²⁶

Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung dengan Hakim atau Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memperoleh keterangan tentang perkara yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan atau orang terkait dengan permasalahan ini di lingkungan Pengadilan Agama Sidoarjo.

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Opcit*, h.101

²⁶ *Ibid*, h.167

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis dan lisan dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.²⁷

Sesuai dengan data yang diperoleh adalah data kualitatif maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan kemudian dicari dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti selanjutnya ditarik kesimpulannya guna menentukan hasilnya. Hasil dari analisis data tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan menentukan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahannya yang diteliti dan data-data yang diperoleh.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Pemaparan dari sistematika penulisan ini bertujuan supaya di dalam proses penyampaian materi dari skripsi nanti dapat mudah

²⁷ Soerjono Soekanto, Op.cit, h.32

dipahami. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, pada tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

Bab I merupakan Pendahuluan, yang berisi uraian dari isi tulisan ini yang bertujuan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai topik yang akan dibahas dalam skripsi nanti. Bab I terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II akan membahas mengenai faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas perkawinan di pengadilan Agama Sidoarjo . Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama membahas mengenai Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan. Pada sub bab kedua mengangkat tentang Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan. Sedangkan, sub bab ketiga mengangkat tentang faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas perkawinan di pengadilan Agama Sidoarjo

Bab III lebih jauh akan membahas mengenai Pertimbangan Hukum dan akibat pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas Pertimbangan Hukum yang Dipakai Dalam Putusan Perkara Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan Poligami. Pada sub bab kedua tentang Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan

BAB IV merupakan bab penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian dikemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan yang ada, yang sekiranya dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.